

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda-beda, namun definisi yang berbeda-beda tersebut merujuk pada inti dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan definisi akuntansi tersebut mudah untuk dipahami.

Definisi akuntansi yang dikemukakan oleh Ibrahim (2016) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan. Akuntansi disebut sebagai proses karena akuntansi memiliki input yang diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output.”

Akuntansi berdasarkan pengertian Hanafi & Halim (2018:27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (penilaian) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Soemarso (2018:5), *American Accounting Association* mendefinisikan sebagai akuntansi adalah “Suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya

penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Purnairawan (2021), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambil keputusan”.

Berdasarkan beberapa Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan yang relevan dengan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Bahri (2016) bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sampai pelaporan secara keuangan periodik dengan perpedoman pada standar akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ditujukan untuk pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi atau pinjaman, pemahaman tentang posisi entitas keuangan, dan Pemahaman tentang entitas dan arus kas.
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk kepentingan internal entitas atau manajemen sebagai perencanaan, pengendalian kegiatan entitas, penilaian kinerja entitas, dan menilai berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan bisnis.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan proses pencatatan, pengukuran, pengalokasian, dan pelaporan informasi biaya produksi. Fungsi

akuntansi biaya adalah penentuan harga pokok produksi, perencanaan, dan pengawasan biaya. Keluaran akuntansi biaya sebagai informasi biaya untuk pengambilan keputusan pihak manajemen.

4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal. Pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan maka untuk pelaporan pajak diperlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal.
5. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)
Pemeriksaan yang dilakukan dengan pemeriksaan keuangan entitas dengan penelusuran bukti-bukti secara objektif dari laporan keuangan dengan tujuan memberikan opini atau pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan kewajaran laporan keuangan untuk memastikan apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
6. Akuntansi Penganggaran (*Budgeting Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan (penganggaran) untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang dengan tujuan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Penganggaran sebagai pengendalian yang bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan aktual (realisasi) dengan laporan keuangan yang ditetapkan sebelumnya (anggaran).
7. Akuntansi Internasional (*International Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan hal-hal yang mencakupnya transaksi internasional dan penyajian laporan keuangan secara internasional, serta harmonisasi atas berbagai standar akuntansi. Akuntansi internasional meliputi kegiatan yang berhubungan dengan transaksi di luar negeri.
8. Akuntansi Sektor Publik (*Government Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya yang bertujuan untuk pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Tujuan organisasi nirlaba adalah bukan menghasilkan laba usaha. Ruang lingkup organisasi sektor publik, yaitu pemerintahan, yayasan sosial, perguruan tinggi, organisasi tempat peribadatan, panti jompo, dan organisasi publik nirlaba lainnya.
9. Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*)
Akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan penyusunan sistem entitas akuntansi sehingga informasi keuangan dan non keuangan disampaikan lebih cepat, tepat, akurat, dan efektif. Sistem akuntansi sangat membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
10. Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan pengenalan dan pembuktian adanya keadaan yang terjadi pada entitas. akuntansi forensic merupakan

formula yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif untuk mengahsilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

11. Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*)

Akuntansi lingkungan muncul karena pertimbangan dampak yang buruk lingkungan dan konsekuensi keuangannya dalam akuntansi manajemen konvensional. Akuntansi lingkungan adalah cabang akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan masalah lingkungan. Hampir sama dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi lingkungan bagian menjadi dua bagian, yaitu Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dan Akuntansi Keuangan Lingkungan (AKL).”

2.1.2 Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 Paragraf 07

(2015:2) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selain itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta sekitarnya pengaruh perubahan harga.”

Definisi laporan keuangan menurut Sulistyanto (2008) adalah sebagai

berikut:

“Laporan keuangan merupakan media yang dipakai perusahaan untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan itu selama satu periode tertentu. Laporan keuangan juga dipergunakan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh dari seluruh aktivitas perusahaan selama selama satu periode itu. Laporan keuangan pun dipergunakan untuk menginformasikan kondisi perusahaan pada saat tertentu sebagai akibat dari apa yang dilakukan dan dialaminya.”

Definisi laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi 2009) paragraf

9 adalah sebagai berikut:

“suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dimaksud adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 12-14 (2015:3) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang mencakupnyaposisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau tanggung jawab manajemen melakukan hal tersebut agar mereka dapat mengambil keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah: “... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angkat-angka dalam satuan moneter.”

Menurut Kasmir (2008) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
 - Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- **Substansi Mengungguli Bentuk**
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
 - **Netralitas**
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
 - **Pertimbangan Sehat**
Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - **Kelengkapan**
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
4. **Dapat dibandingkan**
Dapat dibandingkan adalah pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan

tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.”

2.1.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Faisal dan Setiadi (2021), Pengukuran laporan keuangan menurut SAK-ETAP masih menggunakan dimensi waktu masa lalu yang berbasis biaya historis. Dari proses pembuatannya maka laporan keuangan terbagi menjadi:

1. “Laporan Laba Rugi
Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.
2. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.
3. Neraca
Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Misalnya, pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22)
4. Laporan Arus Kas
Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian yaitu:
 - a. Arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar.
 - b. Arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar.
 - c. Arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi yang memengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi criteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.2.5 Unsur Laporan Keuangan

Menurut Fitriastuti dan Sari (2022: 19) unsur-unsur laporan keuangan terdapat dalam akun yang terbagi atas beberapa jenis sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Akun-akun yang terdapat dalam Neraca (Fitriastuti dan Sari, 2022:19), meliputi:

a. Aset (Harta)

Aset adalah harta yang terdapat dan digunakan di dalam kegiatan perusahaan, yang bersumber dari utang maupun modal. Aset sendiri dikelompokkan dalam beberapa kelompok aset, yakni:

- **Aset Lancar**, adalah jenis aset yang dimiliki dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun, disusun berdasarkan likuiditas, mulai yang paling likuid ke tidak likuid. Aset lancar dapat juga diartikan sebagai aset yang segera berubah bentuk menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Aset lancar disusun: (a) Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan (b) Bank adalah jumlah saldo simpanan di bank sampai tanggal pelaporan, (c) Investasi Jangka Pendek (Surat Berharga/Deposito), adalah jenis investasi yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, (d) Piutang Usaha/Dagang, adalah hak atau klaim yang dimiliki perusahaan dari transaksi usaha, (e) Perlengkapan sebagai bahan habis pakai dalam proses usaha, (f) Persediaan (khusus perusahaan dagang dan manufaktur), adalah barang maupun bahan yang dimiliki untuk dijual kembali atau untuk diolah menjadi barang jadi yang kemudian dijual, (g) Beban dibayar di muka, merupakan beban yang dikeluarkan terlebih dahulu meskipun waktu pengakuan beban belum dijalani, (h) akun lain yang dapat dikelompokkan sebagai aset lancar.
- **Investasi Jangka Panjang**, adalah kelompok aset yang dimiliki dalam bentuk investasi pada entitas lain maupun jenis investasi lainnya, khusus investasi keuangan, dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Termasuk dalam kelompok aset ini adalah (a) investasi pada saham, yakni investasi yang dilakukan melalui kepemilikan saham pada entitas lain, (b) investasi pada obligasi, yakni jenis investasi yang dilakukan melalui pembelian obligasi (surat utang) yang diterbitkan oleh entitas lain, dan aset lain yang dapat dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.
- **Aset Tetap**, adalah kelompok aset (berwujud) yang dimiliki entitas usaha selama lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam

operasional normal perusahaan. Kelompok aset ini disusun berdasarkan kekelannya (masa waktu pakainya), dan harus dialokasikan harga perolehannya selama masa manfaat aset melalui proses depresiasi/penyusutan. Aset disusun: (a) Tanah, merupakan aset yang dimiliki sendiri oleh entitas usaha dan untuk operasional perusahaan, yang aset ini merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak disusutkan karena diasumsikan manfaatnya tidak akan berkurang seperti jenis aset tetap yang lain, (b) Bangunan, (c) Kendaraan, (d) Mesin, (e) Peralatan, dan aset lain yang dapat digolongkan sebagai aset tetap.

- **Aset Tetap Berwujud**, adalah kelompok aset (tidak berwujud) yang dimiliki entitas usaha selama lebih 1 tahun dan digunakan dalam operasional normal perusahaan. Kelompok aset ini disusun berdasarkan umur/masa manfaat, dan harga perolehan akan dialokasikan selama masa manfaatnya melalui proses amortisasi. Termasuk dalam kelompok aset ini di antaranya: (a) Goodwill, merupakan aset tetap tidak berwujud yang dimiliki entitas sebagai akibat dari adanya kombinasi bisnis baik merger maupun akuisisi, di mana harga perolehan entitas tersebut lebih rendah daripada harga pasarnya, (b) Hak paten, (c) Hak Cipta, (d) Hak Waralaba (Franchise), dan aset lain yang dapat digolongkan ke dalam kelompok aset tetap tidak berwujud.
- **Aset lain-lain**, merupakan kelompok aset yang disediakan bagi aset lain yang dimiliki oleh suatu entitas yang tidak dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok aset sebelumnya. Sebagai contoh akun Bangunan dalam Konstruksi, di mana bangunan untuk operasional perusahaan konstruksi/dibangun sendiri oleh perusahaan lebih dari 1 periode pelaporan keuangan. Bangunan ini belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap karena belum selesai/digunakan untuk operasional, sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok aset lain-lain.

Kelompok aset tersebut bukanlah hal mutlak yang harus dimiliki sebuah entitas. Ada kalanya ketika sebuah entitas tidak memiliki investasi jangka panjang, maka kelompok aset ini tidak akan ditemukan dalam laporan keuangannya. Begitu pula halnya dengan unsur akun yang terdapat di dalamnya, misalnya perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan karena tidak melakukan jual beli barang sehingga dalam kelompok aset lancamya tidak ditemukan akun persediaan.

b. Utang (Kewajiban)

Utang adalah kewajiban suatu entitas usaha kepada pihak ketiga yang dibayar/dilunasi dengan cara menyerahkan aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Utang (kewajiban) dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- **Utang Lancar**, merupakan kewajiban yang dimiliki entitas dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan akan dilunasi dengan menggunakan aset lancar. Utang lancar terdiri atas: (a) utang usaha, yakni utang yang timbul dari kegiatan usaha entitas, (b) pendapatan diterima di muka, yakni pendapatan yang telah diterima terlebih dahulu namun jasanya belum diberikan, (c) utang pajak, yakni kekurangan pajak yang harus dibayarkan, dan utang lain yang dapat dikelompokkan sebagai utang lancar.
 - **Utang Jangka Panjang**, merupakan kewajiban yang dimiliki entitas dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun, terdiri atas: (a) utang bank, yakni utang kepada pihak bank, (b) utang obligasi, yakni surat utang yang diterbitkan oleh entitas dan dibeli oleh pihak ketiga sehingga muncul kewajiban untuk melunasinya di kemudian hari, dan utang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai utang jangka panjang.
- c. **Ekuitas (Modal)**
- Ekuitas atau dikenal dengan istilah modal merupakan hak yang dimiliki pemilik atas aset perusahaan. Akun ini menggambarkan jenis modal yang dimiliki oleh sebuah entitas. Jenis entitas bisnis dapat diidentifikasi dari akun ini, sebagai contoh jika jenis modal yang dimiliki adalah modal pemilik maka entitas bisnis tersebut merupakan jenis perusahaan perorangan, demikian pula jika jenis modal yang dimiliki adalah modal saham maka entitas bisnis tersebut merupakan jenis perusahaan perseroan.
- Akun ini di Neraca/Laporan Posisi Keuangan menggambarkan nilai modal/ekuitas akhir yang dimiliki entitas pada tanggal tertentu, sebagai hasil akumulasi modal/entitas awal dengan laba tahun berjalan.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Fahmi (2015) secara umum unsur-unsur yang terkandung dalam laporan laba rugi (*income statement*) adalah:

a. Penjualan (*Sales*)

Sale (penjualan) merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan (Siegel dan Shim). Di sisi lain penjualan menurut (Jumingan) merupakan, "Penghasilan utama dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau perusahaan industri berupa hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli, langganan, penyewa, dan pemakai jasa lainnya." Penjualan kotor dilihat sebagai *gross sales* dan penjualan bersih dilihat sebagai *net sales*. Suatu penjualan dikatakan berhasil jika harga jual barang adalah lebih

tinggi dibandingkan harga produksi, atau harga beli bagi perusahaan dagang. Harga jual harus bisa menutup:

- Harga pokok barang yang dijual.
- Biaya operasi, yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi & umum, seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, biaya komisi penjualan, biaya promosi, dan lain-lain.
- Laba yang diinginkan oleh perusahaan.

b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)

Harga pokok penjualan merupakan harga beli atau pembuatan suatu barang yang dijual, juga disebut *cost of goods sold* (Siegel dan Shim). Pada dasarnya harga pokok penjualan sama dengan harga pokok pembelian seandainya tidak ada persediaan barang dagangan." Namun berdasarkan pada kondisi dan realita di lapangan tetap ada ditemukan barang-barang yang tersisa atau tidak terjual semuanya. Dan barang yang tidak terjual tersebut nantinya akan menjadi persediaan (*inventory*) pada tahun selanjutnya. Mengenai harga pokok penjualan ini ada perbedaan jika kita melihat dari segi perspektif perusahaan dagang dan industri. Bagi perusahaan dagang, harga pokok penjualan adalah harga pokok barang dagangan yang dibeli yang kemudian berhasil dijual selama suatu periode akuntansi.

c. Depresiasi (*Depreciation*)

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi penting, sehingga *cost* yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus.

d. Bunga (*Interest*)

Bunga merupakan balas jasa yang harus diberikan atas dasar kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan. Dalam persoalan bunga biasanya dikenakan bagi mereka yang mengambil pinjaman atau keputusan kredit, seperti kredit ke perbankan. Dalam pencatatan akuntansi untuk bunga kredit dipergunakan dua bentuk yaitu *cash basis* dan *accrual basis* yang mana masing-masingnya memiliki tempatnya tersendiri, yaitu:

- 1) *Cash basis*. Pencatatan secara *cash basis* akan dilakukan apabila kredit tersebut pembayarannya mengalami permasalahan seperti kredit dalam pengawasan atau pantauan khusus, kredit macet,

kredit yang harus dikaji ulang atau diragukan, serta kredit yang dianggap pembayarannya tidak lancar.

- 2) Accrual basis. Pencatatan secara accrual basis akan dilakukan apabila bank melihat bahwa debitur memiliki kelancaran pembayaran yang betul-betul baik.

e. Pendapatan Sebelum Pajak (*Earnings Before Tax*)

Pendapatan sebelum pajak (*earnings before tax*) merupakan laba yang terlihat atau yang diperoleh sebelum dikurangkan dengan pajak.

f. Pajak (*Tax*)

Pajak (*tax*) merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atas penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang pemberian atau sumber-sumber lainnya untuk memberikan pemasukan bagi barang umum (publik).

g. Laba Setelah Pajak (*Earnings After Tax*)

Laba setelah pajak (*earnings after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut juga dengan net income (laba bersih), atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*).

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23), isi laporan laba-rugi terdiri dari:

- Penjualan Bersih (*Net Sales*), hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan
- Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*), Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (*Biaya overhead*)
- Laba kotor (*Gross profit*), Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan
- Biaya Usaha (*Operating Expenses*), Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
- Laba Usaha (*Operating Profit*), Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

- Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*), Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*), Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba ditahan (*Retained Earning*), Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

Menurut Hery (2019: 157) pencadangan atas laba ditahan mungkin dilakukan, di antaranya adalah untuk membeli treasury stock, melunasi utang jangka panjang, melakukan perluasan pabrik, membuka kantor cabang baru, mengatasi ketidakpastian, dan lain sebagainya. Selain dicatat dalam jurnal, peristiwa pencadangan laba ditahan ini juga pada umumnya perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun laba ditahan yang tidak dicadangkan (*unappropriated retained earnings*) dan mengkredit akun laba ditahan yang dicadangkan (*appropriated retained earnings*).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Siti Rahmi (2021), laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan prive dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Karyawati P (2013: 98) laporan arus kas (*cash flow*) adalah: “Laporan arus kas (*cash flow*) merupakan laporan yang menyajikan aliran kas (*cash flow*), baik aliran masuk maupun aliran keluar secara sistematis, berdasarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Laporan arus kas menguraikan sumber dan penggunaan kas, untuk menunjukkan pengelolaan kas dalam perusahaan. Menyajikan arus kas secara sistematis diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat menilai baik tidaknya pengelolaan perusahaan. Pengelolaan dan penempatan kas dengan baik menentukan masa depan perusahaan. Laporan arus kas merupakan salah satu rujukan untuk menganalisa keberhasilan perusahaan di masa depan”.

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:24), secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok

aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:

- **Aktivitas Operasi**, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.

Menurut Kuswandi (2008:141), Arus Kas Bersih = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar.

Menurut Nurliah (2023:142), Arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

- a. Penerimaan dari langganan.
- b. Penerimaan dari piutang bunga.
- c. Penerimaan dividen.
- d. Penerimaan *refund* dari *supplier*.

Arus Kas keluar misalnya berasal dari:

- a. Kas yang di bayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
 - b. Bunga yang di bayar atas utang perusahaan.
 - c. Pembayaran pajak penghasilan.
 - d. Pembayaran gaji.
- **Aktivitas Investasi**, adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan *financial*. Contoh investasi adalah pembelian berupa *asset financial* seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Kesamaan dari semua investasi di atas adalah harapan untuk memperoleh keuntungan (*gain*) di kemudian hari.
 - **Aktivitas Pembiayaan**, yaitu metode yang di gunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi, setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan risiko.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

adalah informasi tambahan yang harus di berikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. (Hendra Harmain, [dkk 2019:27]).

2.1.2.6 Pihak-Pihak yang Membutuhkan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi bisnis antara perusahaan dengan pihak lain. Adapun pihak-pihak tersebut menurut Siswanti, dkk (2022: 50)

1. "Manajemen
Bagi manajemen informasi keuangan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan pada waktu lampau, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan penyusunan strategi di masa yang akan datang atau periode berikutnya. Manajemen juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu, maupun membandingkan dengan industry lain terutama adalah pesaing, guna mengukur posisi perusahaan dibandingkan pesaingnya.
2. Pemilik Perusahaan
Pemilik perusahaan membutuhkan informasi laporan keuangan, untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang dapat diukur dengan perkembangan usaha, pencapaian laba perusahaan, pertumbuhan asset, serta modal, bagi pemilik yang lebih penting adalah tercapainya keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kreditur
Bagi kreditur laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kredit atau pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Hal ini untuk menjaga keamanan asset kreditur yang dipinjamkan kepada perusahaan.
4. Calon Investor
Calon investor merupakan pihak yang menjadi target perusahaan dalam penanaman modal atau investasi. Bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi perlu adanya informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, termasuk kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat kembalian investasi yang diharapkan.
5. Pemerintah atau Dirjen Pajak
Dirjen pajak membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kas negara.
6. Karyawan

Karyawan dapat menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam menghitung besarnya upah dan gaji yang layak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain itu, dengan laporan keuangan tersebut, karyawan dapat memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang, untuk memastikan bahwa perusahaan masih dalam kondisi aman, dan mampu memberikan-memberikan kompensasi sesuai dengan perubahan yang terjadi”.

2.1.3 Teori Asimetri Informasi

2.1.3.1 Pengertian Asimetri Informasi

Informasi Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Pengertian Asimetri Informasi menurut Scott (2003:105) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exist, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Pengertian Asimetri Informasi menurut Prasetya (2012:7) sebagai berikut:

“Informasi Asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa mendatang”

Pengertian Asimetri Informasi menurut Supriyono (2018:192) sebagai berikut:

“Asimetri informasi adalah kondisi suatu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Atasan mungkin memiliki akses yang lebih terhadap informasi yang lebih luas dibandingkan bawahannya sehingga atasan memiliki informasi yang lebih baik. Namun mungkin terjadi sebaliknya, bawahan lebih menguasai informasi unitnya dibandingkan atasannya”

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk memanejemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.

2.1.3.2 Jenis-jenis Asimetri informasi

Menurut Algifari (2012) dalam Lestiyana (2014) tipe-tipe asimetri informasi dibagi menjadi 2 tipe, yakni:

1. *Adverse selection*

Merupakan jenis asimetri informasi dimana dalam perusahaan terdapat satu pihak atau lebih yang melakukan suatu transaksi usaha atau jenis transaksi lain seperti transaksi usaha yang potensial yang mengandung informasi lebih dari yang lainnya.

2. *Moral hazard*

Adalah jenis asimetri informasi yang terjadi karena dalam perusahaan terdapat pihak yang melakukan atau akan melakukan transaksi usaha yang bersifat potensial dan mampu memprediksi adanya tindakan dalam penyelesaian transaksi mereka sedangkan pihak lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Cara pengukuran yang digunakan untuk mengukur terjadinya asimetri informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Bid-Ask Spread*.

2.1.4 Aset Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Definisi Pajak

Menurut Suandy (2016:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Pohan (2013:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara.”

Pengertian pajak menurut Aviantara (2015) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh rakyat atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dikenal dengan 4 macam fungsi yaitu Fungsi Budgetair, Fungsi Regulerend, Fungsi Stabilitas, dan fungsi Redistribusi Pendapatan sebagaimana disebutkan oleh Rahayu (2020:31-45) sebagai berikut:

1. *“Fungsi Budgetair*
Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan

penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi.

2. *Fungsi Regulerend*

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai *fungsi budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu *fungsi budgetair*.

3. *Fungsi Stabilitas*

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.”

2.1.4.3 Asas Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki

penduduknya. Adapapun asas-asas tersebut dijelaskan oleh Rahayu (2020:45-46)

yaitu:

1. “Asas Domisili
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di Indonesia.
2. Asas Sumber
Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.
3. Asas Kebangsaan
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan penaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Dalam asas ini yang menjadi landasan penaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem penaan pajak berdasarkan kewarganegaraan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kewarganegaraan dengan konsep penaan pajak atas *world-wide income*.”

2.1.4.4 Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di suatu negara mengenal 3 (tiga) macam stesel pajak atau cara pemungutan pajak yaitu yang dinamakan sistem nyata sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata dan jelas serta disebutkan dalam undang-undang untuk masing-masing jenis pajak. Sebagaimana disebutkan oleh Rahayu (2020:47-49) sebagai berikut:

1. “Sistem Fiktif

Sistem fiktif merupakan stelsel pajak yang memberikan anggapan kepada jumlah penghasilan wajib pajak dalam masa atau periode tertentu. Pada sistem fiktif atau stelsel pajak fiktif ini kondisi peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan dalam menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Stelsel pajak fiktif ini mengasumsikan bahwa penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh pada awal tahun takwim (1 Januari) berjalan adalah sama dengan penghasilan tahun lalu, atau menganggap bahwa penghasilan tahun berjalan benar-benar merupakan pendapatan yang diterima di tahun lalu. Kondisi ini menimbulkan perbedaan jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak yang terutang seharusnya di akhir tahun. Penilaian pajak tahunan yang dihitung menurut sistem fiktif atau stelsel pajak fiktif adalah berasal dari perhitungan presentasi tarif pajak terhadap jumlah pendapatan yang dikenakan pajak yang dianggap sama dengan tahun lalu.

2. Sistem Nyata (*Riil*)

Sistem nyata atau stelsel pajak riil menetapkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah pada kenyataan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan yang sesungguhnya ada pada akhir tahun sesuai dengan laporan keuangan tahunan yang menginformasikan besaran laba untuk penghasilan pekerjaan bebas, atau berdasarkan informasi jumlah penghasilan berupa gaji setahunnya. Sistem ini menetapkan jumlah pajak berdasarkan kondisi riil tersebut. Selain itu sistem nyata ditetapkan pula untuk jenis pajak untuk suatu transaksi yang terjadi pada saat bersamaan ditentukan pembayaran pajaknya.

3. Sistem Campuran

Sistem campuran ini merupakan stelsel pajak yang mendasarkan pengenaan pajaknya atas stelsel fiktif dan stelsel nyata. Sistem campuran ini diawali dengan mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam tahun pajak berjalan dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu (sesuai dengan yang telah dilaporkan di tahun lalu). Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai baik oleh fiskus maupun wajib pajak disesuaikan dengan kenyataannya. Penghasilan yang benar-benar diperoleh di tahun berjalan sebagai dasar penentuan jumlah pajak yang harus dibayar kemudian ditetapkan. Selanjutnya diadakan pembetulan-pembetulan berupa pengkreditan pajak yang sudah dibayar berdasarkan stelsel anggapan sebelumnya. Dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata”.

2.1.4.5 Penggolongan Jenis Pajak

2.1.4.5.1 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Menurut Rahayu (2020:57) istilah yang perlu dipahami dalam membedakan penggolongan jenis pajak berdasarkan pemungutan secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. “Tax burden : Beban pajak yang dipikul seseorang
- b. Tax shifting : Proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain
 - Forward Shifting : Pajak dilimpahkan kepada konsumen
 - Backward Shifting : pajak dilimpahkan keharga pokok produksi
- c. Tax incidence : Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan
- d. Destinataris : Pihak yang ditunjuk oleh undang-undang pajak untuk memikul beban pajak.”

Dengan pemahaman tersebut maka menurut Rahayu (2020:57-58) dapat dijelaskan perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. “Pajak Langsung
Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), maka pajak tersebut digolongkan sebagai pajak langsung. Karena tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut (*tax Incidence*). Dalam hal ini pihak yang ditunjuk oleh UndangUndang untuk menanggung pajak (*destinataris*) sudah jelas, yaitu karena seseorang atau badan tersebut memiliki sesuatu yang melekat kepada orang atau badan, bukan pada sesuatunya. Pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat ketetapan (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu.
2. Pajak Tidak Langsung
Digolongkan ke dalam pajak tidak langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Akibat dari pengalihan atau pelimpahan tersebut maka *tax incidence* pada akhirnya dibebankan sebagaian atau seluruhnya pada pihak lain. Pajak yang masuk ke dalam golongan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas kohir dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang menyertainya”.

2.1.4.5.2 Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Penggolongan pajak subyektif dan obyektif merupakan pajak yang dilihat dari eratnya hubungan dengan subyek atau obyek pajaknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rahayu (2020:58-59) yaitu:

1. “Pajak Subyektif
Pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak maka digolongkan kedalam pajak subyektif. Pajak ini memberikan focus perhatian pada keadaan wajib pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan wajib pajak.
2. Pajak Obyektif
Apabila pajak erat hubungannya dengan obyek pajak maka digolongkan kedalam pajak obyektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subyek pajak. Obyek dapat berupa sesuatu, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak yang memiliki hukum tertentu hubungan dengan obyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa sebagai subyek pajak tersebut”.

2.1.4.5.3 Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak digolongkan kedalam pajak pusat atau pajak daerah dilihat dari kriteria lembaga atau instansi yang melakukan pemungutan pajak. Apabila yang melakukan administrasi pajaknya adalah Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan maka pajak tersebut digolongkan kedalam jenis pajak pusat. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM). Apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah maka digolongkan kedalam pajak daerah. Dibedakan pemungut pajak Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kota.

2.1.4.6 Pengertian Pajak Tangguhan

Waluyo (2008:216) mendefinisikan pajak tangguhan sebagai berikut:

“Pajak Tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Suandy (2016:99) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut:

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Murhaban (2003:66) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut:

“Pajak tangguhan adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang” Dari pengertian menurut ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang berasal dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak akibat perbedaan temporer.

2.1.4.7 Faktor Penyebab Pajak Tangguhan

Menurut Timuriana & Muhamad (2015:15) antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan

berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan.

Menurut Fadly & Lestiowati (2019:13), perbedaan perlakuan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menentukan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak mengakibatkan perusahaan harus melakukan koreksi/rekonsiliasi fiskal. Supriyanto (2011:132) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/ rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terjadi perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Perbedaan perlakuan tersebut dikenal dengan beda tetap dan beda temporer (beda waktu).

Menurut PSAK 46, perbedaan permanen/perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Permanent difference atau perbedaan permanen ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. *Permanent difference* atau perbedaan permanen merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya. Timuriana & Muhamad (2015:15) mengatakan bahwa beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan.

Perbedaan temporer menurut PSAK 46 yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Perbedaan temporer dapat berupa:

- a) “Perbedaan temporer kena pajak – liabilitas – menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.
- b) Perbedaan temporer dapat dikurangkan – aset – menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.

”Fadly dan Lestiowati (2019:14) mengatakan, bersifat sementara artinya adalah apabila penghasilan atau biaya yang tidak dapat diakui pada suatu periode, maka penghasilan atau biaya tersebut kemungkinan dapat diakui pada periode selanjutnya. Perbedaan temporer juga dapat berupa perbedaan metode dalam SAK dan ketentuan perpajakan, diantaranya adalah perbedaan metode penyusutan dimana metode garis lurus dan saldo menurun merupakan metode yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan; perbedaan metode persediaan dimana metode rata-rata dan FIFO merupakan metode persediaan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan; serta penyisihan piutang tak tertagih dimana menurut ketentuan perpajakan penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali

untuk usaha-usaha tertentu sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Menurut Timuriana & Muhamad (2015:15) beda sementara sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan menurut Zain (2008:199) sebagai berikut

Penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini:

1. “Perbedaan permanen/tetap
Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode (*Interperiod Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temu atau saldo tandingannya (*counter balance*).
2. Perbedaan waktu/sementara
Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial 39 mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu dapat berupa:
 - a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai

- tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *Deferred Tax Liability*.
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deferred tax asset*.
3. Kompensasi kerugian
Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.
 4. Kredit pajak investasi
Apabila suatu perusahaan membeli atau mengonstruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang. Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.
 5. Alokasi pajak interperiode Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan dibagikan ke:
 - a. Penghasilan operasinal berkelanjutan
 - b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut
 - c. Hal-hal luar biasa
 - d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan
 - e. Penyesuaian dengan periode terdahulu.”

Menurut Zain (2008:199) Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Menurut Djamaluddin (2008:58)

selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan dijelaskan dalam tiga hal, yaitu aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan (Aminah & Zulaikha, 2019:3). Berdasarkan PSAK No. 46, selisih antara beban Pajak kini dan dan beban pajak komersil adalah Beban Pajak Tangguhan. Beban Pajak Kini adalah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak. Beban Pajak Komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh Wajib pajak dari Penghasilan Sebelum pajak dalam laporan Keuangan Komersil dikalikan dengan tarif pajak. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan.

2.1.4.8 Pengertian Aset Pajak Tangguhan

Menurut PSAK No. 46 aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangi, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum

dimanfaatkan.”Menurut Waluyo (2008:217), aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Jumlah pajak terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian.”

Dari pengertian aset pajak tangguhan di atas dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang kemungkinan dapat terpulihkan akibat selisih temporer yang menyebabkan pajak yang dibebankan lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut undang-undang pajak.

2.1.4.9 Faktor Penyebab Aset Pajak Tangguhan

Trisnawati & Agus (2013) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) timbul apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Menurut Harnanto (2013) aktiva pajak tangguhan adalah dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya PPh di masa yang akan datang namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang. Dampak dari PPh di masa yang akan datang itu sebaiknya dapat diakui, dihitung,

disajikan dan dapat diungkapkan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan dapat saja membayar pajaknya lebih kecil pada waktu sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa yang akan datang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak lebih besar sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang.

Anasta (2015) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan disebabkan karena terpulihkannya jumlah pajak penghasilan di periode mendatang, sebagai dampak dari perbedaan temporer yang dikurangkan dengan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat dicatat jika terdapat kemungkinan terjadinya realisasi manfaat pajak di masa mendatang, oleh karena itu diperlukan judgement supaya dapat menaksir realisasi aset pajak tangguhan. Menurut Suranggane (2007) nilai tercatat suatu perusahaan harus diturunkan apabila aset pajak tangguhan tidak lagi dapat dikompensasi dengan laba fiskal, sehingga penurunan ini harus sesuai dengan besarnya laba fiskal yang terdapat pada perusahaan tersebut.

Menurut Sutadipraja, dkk (2020) aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan.

2.1.4.10 Pengukuran Aset Pajak Tangguhan

A. DTA Ratio

Dalam penelitian ini Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) diukur dengan rasio akuntansi menurut *GMT Research* yang diperoleh

dari saldo Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) tahun t dibagi dengan *sales* (penjualan) tahun t. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$DTA\ ratio = \frac{Deferred\ Tax\ Asset}{Sales}$$

(*GMT Research*)

Menurut Waluyo (2008:217) Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang.

B. APTit

Aktiva pajak tangguhan adalah selisih antara pajak tangguhan pada periode sekarang dengan periode yang telah lalu. Aktiva pajak dapat diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t-1. Hal ini dirumuskan sebagaimana dikatakan oleh Baraja,dkk (2019).

$$APTit = \frac{\Delta Aktiva\ pajak\ tangguhan\ t - 1}{Aktiva\ pajak\ tangguhan\ t - 1}$$

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Definisi Leverage

Menurut Kasmir (2017: 151), Leverage adalah: “Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Leverage menurut Herispon (2016:40) merupakan: “Rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya jika suatu saat perusahaan itu terancam dibubarkan.”

Rasio solvabilitas atau leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor (Wastam Wahyu Hidayat, 2018:46).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya

2.1.5.2 Tujuan Leverage

Rasio Leverage Menurut Kasmir (2019:153), berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki

2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio Leverage

Menurut Kasmir (2019:155), dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio leverage yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio leverage antara lain:

a. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Perusahaan akan dikatakan baik jika perusahaan itu bisa mencapai rasio hutang di bawah rata-rata industri. Apabila rasio hutang rata-rata industri sebesar 35%, maka rasio hutang dengan kurang dari 35% berarti perusahaan dikatakan baik (Kasmir, 2019:157).

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

d. *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2019:160), *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Rumus untuk mencari times interest earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

e. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan

atau jangka panjang. Rumus untuk mencari fixed charge coverage (FCC) adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

2.1.6 Manajemen Laba

2.1.6.1 Definisi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistiyanto (2008), manajemen laba adalah

“Perilaku oportunistis seorang manajer untuk memperlakukan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Manajer akan bermain-main dengan komponen akrual yang *discretionary* untuk menentukan besar kecilnya laba, sebab standar akuntansi memang menyediakan berbagai alternatif metode dan prosedur yang bisa dimanfaatkan.”

Menurut Wirakusuma (2016) manajemen laba adalah:

“...suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu”.

Definisi manajemen laba menurut Davidson, Stickney, dan Weil (1987)

dalam Sri Sulistyanto (2008) yaitu:

“Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.”

Menurut Dwi Martani (2012:113) definisi manajemen laba adalah:

“Manajemen laba merupakan tindakan yang mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Biasanya manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu dan juga dalam bentuk menurunkan laba di periode ini, agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut diantaranya untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan agar terlihat baik, atau perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah dengan cara menurunkan laba perusahaan.

2.1.6.2 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2008) "*Bonus Plan Hypothesis* Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.

1. *Debt Covenant Hypothesis* Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.

2. *Political Cost Hypothesis* Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan”.

2.1.6.3 Model Dasar Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:177), terdapat tiga pola dalam manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. “Penaikkan Laba (*Income Increasing*)
Pola penaikkan laba (*income increasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
2. Penurunan Laba (*income decreasing*)
Pola penurunan laba (*income decreasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
3. Perataan Laba (*Income Smoothing*)
Pola perataan laba (*income smoothing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.”

2.1.6.4 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott (2015:447) adalah sebagai berikut:

1. “Taking a bath
Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organization stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola taking a bath adalah praktik manajemen laba dengan

menghapus asset-aset yang menimbulkan biaya di masa depan. Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Pada perusahaan yang baru mengalami pergantian pimpinan perusahaan, jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sehingga harus melaporkan kerugian, manajer baru cenderung bersemangat melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target.

2. *Income minimization*

Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan asset kapital dan asset tak berwujud, serta membebaskan pengeluaran R&D. salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba adalah peraturan pajak dan motivasi public. Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relative sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan asset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi, manajer seringkali memilih untuk melaporkan laba yang rendah dari laba yang seharusnya. Demi menjaga konsistensi bantuan, subsidi, atau risiko diprivatisasi, manajer cenderung menurunkan laba karena khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapatkan bantuan.

3. *Income maximation*

Praktik manajemen laba ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk memaksimalkan laba. Pola ini merupakan kebalikan dari pola income minimization. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukannya beragam, mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan.”

2.1.6.5 Model Empiris Manajemen Laba

Ada tiga pendekatan yang telah yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulistyanto (2008) yaitu:

1. “Model Berbasis *Aggregate Accrual* Model berbasis *Aggregate Accrual* yaitu Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary accrual Sebagai proksi manajemen laba.
2. Model Berbasis *Spesific Accruals* Model kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.
3. Model Berbasis *Distribution Of Earnings After Management*. Model Berbasis *Spesific Accruals* yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.”

2.1.6.6 Metode Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyano (2008: 216) model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba. Pertama kali dikembangkan oleh Healy, De Angelo, model Jones serta model Jones Modifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan modelmodel lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai *total accrual*

(TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode berangkutan.

Langkah I : Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata *total accrual* (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA}{T}$$

Dimana:

NDA = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = *Total accrual* yang diskala dengan total aktiva periode t-1.

T = 1, 2,T merupakan tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi. t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara *total accrual* (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

Discretionary accrual merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata *total accrual* (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

$NDCAt$ = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

$TACt$ = *Total accrual* periode t.

$TAt-1$ = total aktiva periode t-1.

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara *total accrual* (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

Discretionary accruals merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana.

$$\frac{TAC_{i,t}}{A_{i,t-1}} = b_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + b_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + b_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{AT_{i,t-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aset untuk perusahaan I periode t-1

$REVI,t$ = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap perusahaan i periode t

Selain itu menghitung *nondiscretionary accruals* model (NDA) adalah sebagai berikut:

$$NDA = \alpha_1 \frac{1}{AT_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan i periode t

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ = Firm-specific parameters

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (TAC) dan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones Dimodifikasi

Model Jones dimodifikasi (*modified Jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I : Menghitung nilai *total accrual* (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan

$$TAC = NI_{i,t} - CFO_{i,t}$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan *Ordinary Least Square* dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{i,t}}{A_{i,t-1}} = b_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + b_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + b_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{AT_{i,t-1}} \right) + \varepsilon$$

Langkah II : Dengan koefisien regresi sebagaimana di atas, maka *NonDiscretionary Accruals* ditentukan sebagai berikut:

$$NDTA_{i,t} = b_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + b_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + b_2 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$$

Langkah III : terakhir untuk menentukan nilai *Discretionary Accrual* sebagai ukuran manajemen laba ditentukan sebagai berikut:

$$DTA_{i,t} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$: *Total accruals* perusahaan *i* pada periode *t*.

$N_{i,t}$: Laba bersih perusahaan *i* pada periode *t*.

$CFO_{i,t}$: Aliran kas aktivitas operasi perusahaan *i* pada periode *t*.

$TA_{i,t-1}$: Perubahan total asset perusahaan *i* pada periode *t-1*.

$\Delta Sales_{i,t}$: Penjualan perusahaan *i* pada tahun *t* dikurangi dengan penjualan perusahaan *i* pada tahun *t-1*.

$\Delta TR_{i,t}$: Piutang usaha perusahaan *i* pada tahun *t* dikurangi dengan piutang usaha perusahaan *i* pada tahun *t-1*.

$PPE_{i,t}$: Total aset tetap berwujud (*Gross property, plant and equipment*) perusahaan *i* pada periode *t*.

$NDA_{i,t}$: *Non discretionary accruals* perusahaan *i* pada periode *t*.

$DTA_{i,t}$: *Discretionary accruals* perusahaan *i* pada periode *t*.

Menurut Sulistyanto (2008) secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negative. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangan. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan peralatan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola

kenaikan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Satwika dan Damayanti (2005) dalam Silvia (2022) menjelaskan bahwa akrual dibedakan menjadi dua macam yaitu terdiri dari:

1. *Nondiscretionary Accruals*, yaitu akrual yang sudah ditetapkan oleh standar.
2. *Discretionary Accruals*, yaitu akrual yang timbul dari diskresi/keleluasan yang dimiliki oleh manajemen untuk memilih metode, prinsip dan estimasi.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:145) *Nondiscretionary Accruals* yaitu: “... merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi”.

Menurut Sri Sulistyanto (2008) *Discretionary Accrual* yaitu: “... merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Discretionary Accrual* merupakan komponen akrual yang timbul dari keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.

2.2 Kerangka Pemikiran

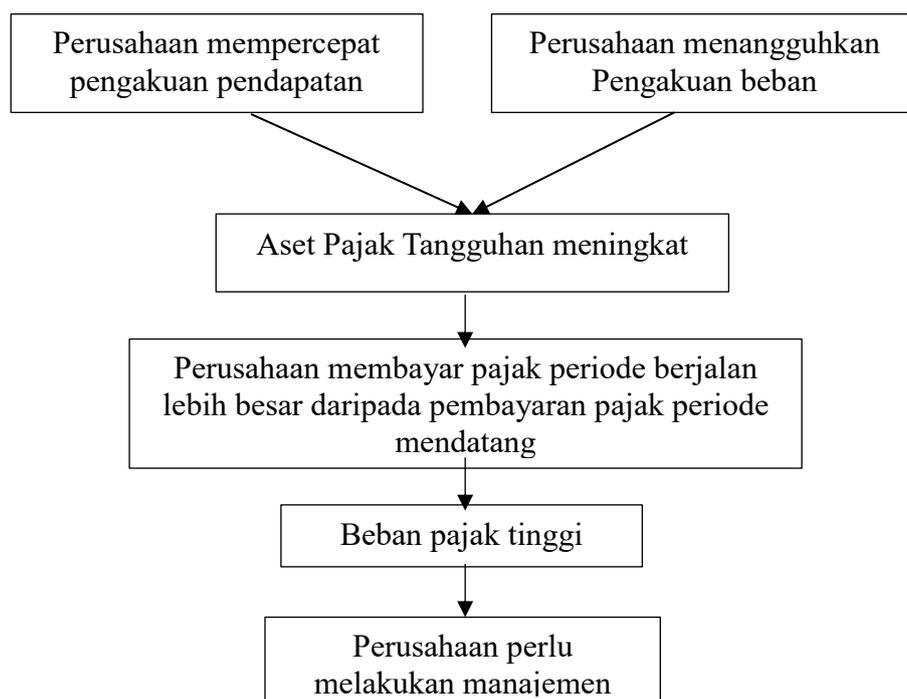
2.2.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Yulianti (2012). Aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan laba menurut perusahaan atau laba komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut fiskal. Sehingga perusahaan membayar pajak periode tertentu lebih besar daripada pembayaran pajak periode mendatang. Karena pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih hemat berarti laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar. Hal ini merupakan upaya manajemen untuk mencapai laba yang besar untuk memperoleh berbagai keuntungan untuk dirinya sendiri yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba (Achyani & Lestari, 2019). Sulistiyanto (2018) menyatakan bahwa, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Perencanaan pajak terkait dengan pelaporan laba perusahaan. Laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan menggunakan berbagai teknik manajemen laba untuk mencapai target (Ratna Eka 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasmi (2017), Lucy Citra Fitriany (2016), Titi Andrayani Fitriasuri, M, Titan Terzaghi (2018), Septa Yulianah, Dwiyani

Sudaryanti, Hariri (2021), yang menyatakan bahwa Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

Kerangka pemikiran pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

2.2.2 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi (Kasmir, 2012:151)

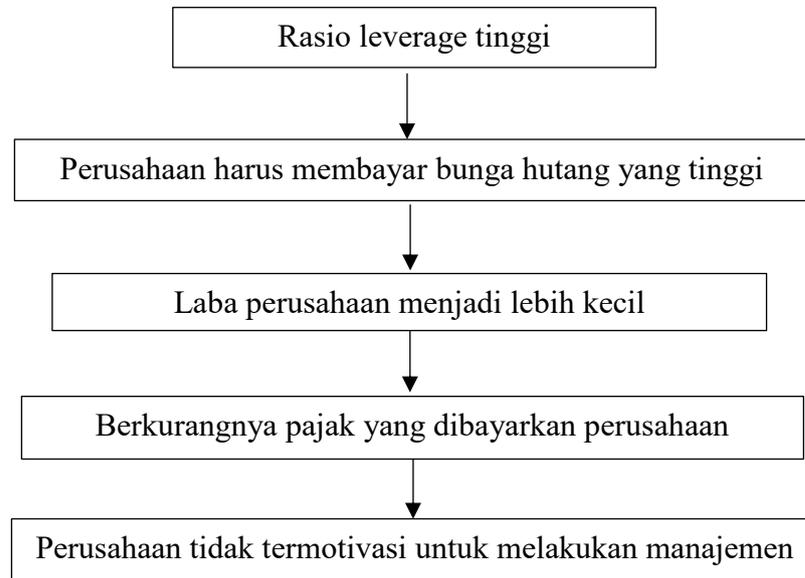
Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga hutang yang

tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan Suyanto (2010) dalam Mariana (2020). Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. (Herwiyanti 2019).

Konsekuensi tingginya rasio leverage adalah semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Pendanaan melalui utang memiliki sisi positif bagi perusahaan terkait dengan perpajakan karena pembayaran bunga merupakan beban yang boleh dikurangkan menurut aturan perpajakan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang. Dengan demikian, manajemen perusahaan tidak termotivasi untuk melakukan manajemen laba. (Rudy Hendrata 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainaul Maslihah (2019), Dendi Purnama (2017), dan Arief Fahmie (2019), yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

Kerangka Pemikiran Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Leverage Terhadap Manajemen Laba

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:63) mendefinisikan Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagaimana berikut:

H₁ : Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

H₂ : Leverage berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba